

**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT'S FINANCIAL
REPORT INFORMATION (A CASE STUDY ON PEKANBARU LOCAL GOVERNMENT)**

Sudarno dan Eva Susanti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 78-88 Telp (0761) 24418 Pekanbaru 28127
Email: sdntalenta@yahoo.com dan eve_eshanty@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to determine factors influencing local government financial statement quality. Based on PP No. 71 year 2010, state and local government financial statement quality have to meet the qualitative characteristic. Factors examined include human resource competency, internal control systems, and, financial accounting systems. The used sampling method is purposive sampling. Data collection is done by giving as many as 88 copies of the questionnaire, which was distributed to respondents who are financial data collection is done by giving as many as 150 copies of the questionnaire, which was distributed to respondents who are financial management staff in Pekanbaru City. The Data obtained are then analyzed using SPSS 16.00. Based on the analysis results, obtained that the human resource competency, internal control systems, and, financial accounting systems have a positive and significant effect to the quality of financial reporting information in SKPD Pekanbaru City.

Keywords: Human Resource Competency, Internal Control System, Financial Accounting Systems and The Quality Of Financial Reporting Information.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS INFORMASI PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Informasi pelaporan Keuangan daerah. Dasar dari penelitian ini PP no 71 tahun 2010, Laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas harus memenuhi karakteristik laporan keuangan. Faktor yang akan diteliti adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, pengumpulan data didapat dari penyebaran kuisioner kepada 88 staff pengelola keuangan di Pemerintah Kota Pekanbaru dan data peroleh dianalisa menggunakan SPSS 16. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan sistem informasi keuangan daerah, berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya. Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan para pemakai informasi.

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Agar bermanfaat informasi tersebut harus dapat dipahami, dapat dipercaya dan dapat berguna bagi pemakai informasi.

Organisasi memerlukan sumber daya manusia yang mampu mengimbangi dinamika organisasi tersebut, yaitu sumber daya manusia yang memiliki nilai yang kuat, fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Untuk itu sumber daya manusia harus memiliki kapasitas yang dibangun di atas pondasi yang kuat, yang sesuai dengan tuntutan usaha. Sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dapat meningkatkan kapasitas dan membangun pondasi dalam pekerjaannya, sehingga dia akan lebih baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun mental serta karakter produktifnya. Dengan kepemilikan nilai (*value*) yang kuat, mereka akan selalu siap menghadapi perubahan sesuai dengan tuntutan organisasi tanpa menghilangkan jati dirinya.

Sebagai bagian dari perwujudan nilai akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pembangunan dalam bentuk laporan keuangan daerah di setiap tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban hasil-hasil pembangunan tersebut sebagai upaya pemerintah dalam menunjukkan transparansi pelaksanaan pembangunan kepada para *stake holders*, seperti masyarakat, DPRD, lembaga pemeriksa dan pihak lain seperti pengawas jalannya pembangunan daerah.

Melalui dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan, diharapkan dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas, berbasis teknologi informasi (IT) terkini dan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang mengatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun selanjutnya disampaikan dengan mekanisme yang telah ditetapkan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah melalui pemeriksaan (audit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca Daerah, Laporan Arus Kas (LAK), Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Daerah harus mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Menurut Hasil pemeriksaan BPK (IHSP, 2015:94) secara nasional atas 539 Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014, BPK hanya memberikan opini WTP atas 252 (47%) LKPD, opini WDP atas 247 (46%) LKPD, opini TMP atas 35 (6%) LKPD, dan opini TW atas 5 (1%) LKPD. Secara umum, atas LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan masih memiliki kelemahan pada pelaporan keuangan sesuai dengan SAP. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas: (1) Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat; (2) Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan; (3) Terlambat menyampaikan laporan; (4) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan (5) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Fenomena yang ada pada SKPD Kota Pekanbaru, banyaknya rekrutmen dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan serta kurangnya arahan dan pengenalan prosedur kerja awal dari setiap pegawai baru sebelum memulai pekerjaannya, sebagian besar pegawai pengelola keuangan dan pembuat laporan keuangan di SKPD Kota Pekanbaru melalui wawancara mengaku begitu bekerja langsung *On The Job* atau langsung terjun ke inti pekerjaannya tanpa *coaching* atau pengarahan detail dan *step by step* sistematis dari pekerjaan yang ada misalnya bagian pengelola keuangan dan pembuat laporan keuangan langsung diberikan *user officer* guna dapat

langsung bekerja, padahal belum saatnya diberikan dan terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik sehingga banyak pencatatan dan pelaporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Amran, 2009 dalam Mahaputra (2014:231) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi. Hal ini senada dengan penelitian Wiwik Andrini, 2008 dalam Mahaputra (2014:231) yang memperoleh hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah. Dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu meningkatkan kualitas informasi pada pelaporan keuangan.

Ketidapahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan.

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 64 Tahun 2013).

Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 65 Tahun 2010, SIKD memberi manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Fenomena yang muncul di SKPD yang ada di Kota Pekanbaru dalam penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) belum berjalan sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan salah satunya dapat dilihat dari hasil Audit BPK dimana Penatausahaan Kas Umum Daerah Kota Pekanbaru Tidak Sesuai Dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada penelitian Fikri Miftahul, 2011 dalam mahaputra (2014:231) yang memperoleh hasil Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian pemanfaatan SIKD dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mampu meningkatkan kualitas informasi pada laporan keuangan.

Tabel 1. Opini BPK Laporan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru

No	Tahun	Opini BPK
1	2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
No	Tahun	Opini BPK
6	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : www.bpk.go.id, 2016

Fenomena yang lain yang ditemukan di SKPD kota Pekanbaru adalah masih lemahnya pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan hal ini berakibat pada kualitas laporan keuangan daerah sehingga opini Laporan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru yang diberikan oleh BPK dari tahun 2010-2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut Nurillah (2014) ditemukan adanya pengaruh yang signifikan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan hal ini bertentangan dengan penelitian Anggraini (2014) dimana tidak ditemukannya pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Sidoarjo. Kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan Kota Pekanbaru menurut hasil audit BPK untuk tahun 2014 antara lain: (1) Persiapan Pemerintah Kota Pekanbaru Menuju Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrua Belum Memadai; (2) Penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah Trans Metro Pekanbaru (BLUD TMP) Belum Sesuai Dengan Ketentuan; (3) Pengelolaan Piutang Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Tidak Memadai; (4) Pemerintah Kota Pekanbaru Belum Melakukan Validasi atas Piutang BPHTB dan PBB secara optimal; (5) Nilai Piutang Retribusi IMB Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya; (6) Nilai Investasi Non

Permanen Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya; (7) Nilai Aset Tetap Sebagian Belum Didukung Dengan Dokumen Sumber Yang Memadai dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; (8) Revitalisasi Atas Bangunan di Tiga SKPD Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Nilai Aset Pada Neraca Kota Pekanbaru Disajikan Overstated; (9) Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Belum Memadai.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru? (2) Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru? (3) Apakah Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru?

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Kompetensi

Waytt dalam Fuad dan Ahmad (2009:19) dalam bukunya *Integreted Human Resources Development* juga mendefinisikan *competency* sebagai kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan perilaku (*attitude*). Keterampilan, pengetahuan dan perilaku itu dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Berger and Berger dalam Fuad dan Ahmad (2009:20) dalam bukunya *Integreted Human Resources Development* mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik (kombinasi beberapa karakteristik) yang dapat diukur secara andal dan relatif bertahan lama (stabil) yang dimiliki seseorang, tim atau organisasi. Secara statistik “Kompetensi” dapat memprediksi kriteria (ukuran) tingkatan kinerja.

Manopo (2011:90) dalam bukunya *Competency Based Talent and Performance Management System* menyatakan manfaat kompetensi adalah: (1) Manfaat proses seleksi berbasis kompetensi antara lain menyediakan gambaran yang jelas mengenai persyaratan jabatan, meningkatkan kemungkinan orang-orang yang direkrut akan sukses dalam pekerjaannya, meminimalkan biaya investasi atas merekrut orang-orang yang ternyata tidak memenuhi harapan perusahaan, dan memastikan proses wawancara yang lebih sistematis. (2) Manfaat pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi antara lain menjadikan organisasi untuk fokus pada perilaku dan keterampilan yang relevan, memastikan keterkaitan pelatihan dan pengembangan, menjadikan kegiatan pelatihan dan pengembangan lebih efektif, dan menyediakan kerangka bagi atasan untuk melakukan bimbingan. (3) Manfaat sistim manajemen kinerja yang berbasis kompetensi yaitu menyediakan pemahaman mengenai apa yang akan dimonitor dan diukur dan memberi fokus dan memfasilitasi diskusi atas penilaian kinerja. (4) Manfaat sistem perencanaan karier berbasis kompetensi yaitu mengklarifikasikan keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik yang diperlukan, menyediakan metode untuk mengukur kesiapan calon karyawan yang akan dipromosikan, dan fokus pada rencana pelatihan dan pengembangan pada kompetensi yang perlu dikembangkan.

Selanjutnya Ma'arif dan Tanjung Fuad dan Ahmad (2009:32) mengklasifikasikan kompetensi berdasarkan lima kelompok yang harus dimiliki oleh SDM andal, yaitu sebagai berikut: (1) Kepribadian dan Motivasi (*Personality dan Motivation*). (2) Daya Nalar (*Sense Making*). (3) Daya Cipta Pengetahuan (*Knowledge Creating*). (4) Daya Mengambil Keputusan (*Decision Making*). (5) Budaya Organisasi (*Organization Culture*)

Ada lima karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut: (1) Motif (*Motive*), apa yang secara konsisten dipikirkan atau keinginan-keinginan yang menyebabkan melakukan tindakan. Contoh motif berprestasi akan memotivasi orang-orang secara terus menerus untuk merancang tujuan yang cukup menantang serta mengambil tanggung jawab atas pekerjaannya. (2) Sifat/ciri bawaan (*Trait*), ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi. Contoh, reaksi waktu, luas pandangan yang baik merupakan kompetensi bagi seorang pilot. (3) Konsep diri (*Self concept*), sikap, nilai atau *self image* dari orang-orang. Contoh, percaya diri (*self confidence*), keyakinan bahwa ia akan efektif dalam berbagai situasi, merupakan bagian dari konsep dirinya. (4) Pengetahuan (*Knowledge*), yaitu suatu informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. (5) Keterampilan (*Skill*), kemampuan untuk mampu

melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental tertentu. Contohnya seorang dokter gigi memiliki kemampuan menambal dan mencabut gigi tanpa merusak syaraf.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/ Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Pengendalian intern akuntansi, dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. (2) Pengendalian administratif, dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Pengendalian intern yang didefinisikan oleh COSO (1992) adalah: *“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: (1) Effectiveness and efficiency of operations. (2) Reliability of financial reporting. (3) Compliance with applicable laws and regulations.”*

Lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO (Sawyer et al, 2006 dalam Sukmaningrum dan Harto, 2012:8) yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsure-unsur lainnya dalam sistem pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran, dan kompetensi. (2) Penilaian risiko yaitu pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. (3) Kegiatan Pengendalian yaitu membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. (4) Informasi dan Komunikasi pada dasarnya merupakan pendukung dari elemen system pengendalian internal lainnya. Inti informasi dan komunikasi adalah manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan atau rekan kerjanya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan tanggungjawab pengendalian secara baik. (5) Pemantauan (*Monitoring*) harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 pada Pasal 70: ayat 1, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi: “Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi

Tujuan yang akan dicapai dalam penyesuaian sistem akuntansi tersebut menurut Mulyadi (2006:19) dalam bukunya Sistem Akuntansi menyatakan tujuan umum penyusunan sistem akuntansi tersebut adalah sebagai berikut: (1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. (2) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. (3) Untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai

pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. (4) Untuk mempengaruhi biaya terikat dalam pelanggaran catatan akuntansi”.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah.

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi: (1) Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cashbasis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah. (2) Penggolongan dan Pengikhtisaran, Adanya penjumlahan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan. (3) Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Pihak-pihak yang memerlukan antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan donatur; Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; Pemerintah Daerah lain; dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

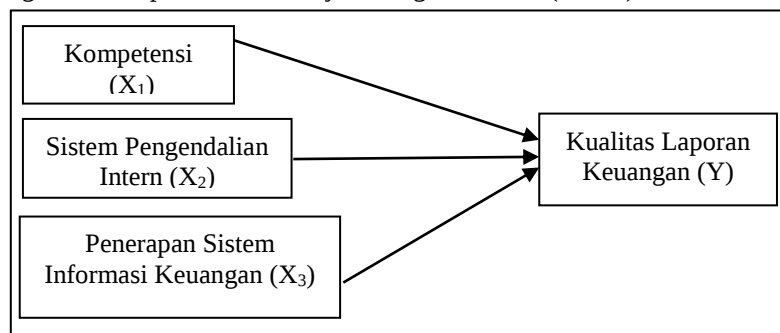
Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut PP RI No. 71 Tahun 2010 menyatakan laporan keuangan pokok terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran meliputi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. (2) Laporan Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (3) Laporan Operasional (LO) terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer dan akun luar biasa. (4) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (5) Neraca Daerah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai *asset*, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. (6) Laporan Aliran Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. (7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 dalam bukunya ”Standar Akuntansi Pemerintahan” menyatakan ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki antara lain relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Mengacu pada perumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka serta kerangka konseptual yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis penelitian perlu dirumuskan secara tegas dan jelas. Adapun rumusan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- H₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan dari Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Pekanbaru
- H₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Pekanbaru
- H₃ : Terdapat pengaruh yang signifikan dari Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Pekanbaru



Sumber : Data Olahan, 2016

Gambar1: Kerangka Pemikiran Teoritis

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Pekanbaru) (Sudarno)

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru mengingat LKPD Kota Pekanbaru belum pernah mendapat peringkat baik atau opini WTP dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui apa yang mempengaruhi kualitas LKPD,

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan pengelola keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Jumlah SKPD sebanyak 44 yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat Dewan, 1 Inspektorat, 10 Badan, 17 Dinas, 2 Kantor, dan 12 Kecamatan. Pengelola keuangan dimasing-masing SKPD berjumlah 4 orang sehingga total populasi sebanyak 176 orang. Teknik pengambilan sampel terhadap responden yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sub bagian pengelola keuangan yakni sebanyak 2 orang disetiap SKPD, karena pengelola keuangan ini yang memiliki peranan penting dan tugas pokok fungsi serta yang bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD sehingga jumlah sampel keseluruhan dengan jumlah SKPD sebanyak 44 SKPD menjadi 88 sampel.

Untuk Kebutuhan analisis data dan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini diperlukan data sebagai berikut: (1) Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan langsung diberikan kepada pengumpul (Sugiyono, 2009:129). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari kuisioner yang penulis sebarakan ke pihak – pihak yang terkait dalam SKPD Kota Pekanbaru. (2) Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2009:129) dalam bukunya Statistika Untuk Penelitian. Data ini umumnya berupa bukti – bukti, catatan, atau laporan historis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel

Tiga variabel bebas yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan variabel terikat yaitu Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. Melalui kuisioner yang telah disebarakan, diperoleh data mengenai variabel-variabel tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. Deskripsi Variabel

Variabel	Rata-rata
Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	4.13
Variabel Kompetensi SDM (X1)	4.13
Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2)	4.12
Variabel Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah(X3)	4.13

Ini berarti Kualitas laporan Keuangan Daerah, dipengaruhi oleh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada SKPD Kota Pekanbaru

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pada Pengujian Validitas menunjukkan semua item pernyataan untuk variabel Kompetensi SDM (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2) dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X3) dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) mempunyai nilai korelasi (*corrected item total correlation*) > 0,30 dengan demikian berarti item-item pernyataan pada variabel variabel Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah valid untuk pengujian selanjutnya

Pada pengujian reliabilitas menunjukkan semua item pernyataan untuk variabel Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah mempunyai nilai dengan *Cronbach's Alpha* > 0,60, dengan demikian pengukuran dapat dikatakan hasil ukuran terpercaya (*reliabel*) sehingga ukuran dapat diandalkan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Nilai p untuk setiap variabel yang diujimemakai *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka data variabel dengan jumlah sampel sebanyak 88 adalah normal atau memenuhi syarat uji normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 baik pada sumbu Y. Kesimpulannya adalah bahwa regresi terbebas dari kasus heteroskedastisitas dan memenuhi persyaratan uji asumsi klasik tentang heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Hasil tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih dari 10 yang berarti tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Nilai DW sebesar 2.230 nilai tersebut telah memenuhi persyaratan tidak terjadinya autokorelasi bahwa $DU < DW < 4 - DU$ ($1.7243 < 2.230 < 2.2857$).

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien regresi dari *Understandarized Coefficient B*, maka diperoleh persamaan linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -0.811 + 0.235X_1 + 0.403X_2 + 0.401X_3$$

Uji Hipotesis

Hipotesa 1

Pada hasil uji parsial (uji t) memiliki t hitung > t tabel yaitu $2.311 > 1.988$, nilai signifikansi $0.023 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya Kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru

Hipotesis 2

Pada hasil uji parsial (uji t) memiliki t hitung > t tabel yaitu $5.924 > 1.988$, nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ maka diketahui Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru

Hipotesis 3

Pada hasil uji parsial (uji t) memiliki t hitung > t tabel yaitu $4.766 > 1.988$, nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ maka diketahui Sistem Informasi Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru

Hipotesis 4

F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} yaitu $68.394 > 3.104$ dan sign < 0.05 hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (X_1 dan X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas (Y)

Koefisien Korelasi dan Determinasi (R^2)

Nilai koefisien korelasi linier R sebesar 0,926 (92,6%), Hal ini berarti hubungan antara Kompetensi SDM (X_1), Sistem Pengendalian Intern (X_2) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X_3) mempunyai hubungan dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) kuat dan tinggi.

Koefisien determinasi ($Adj R^2$) merupakan ukuran kesesuaian garis linier berganda terhadap suatu data. Koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang diperoleh sebesar determinasi (*adjusted R²*) yang diperoleh sebesar 0,853 (85,3%) hal ini berarti 85,3% Kualitas Laporan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Sedangkan sisanya 14,7% dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada SKPD Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pada Uji t (Uji parsial) variabel Kompetensi SDM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan mempunyai pengaruh positif atau searah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern dan, Sistem Informasi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan mempunyai pengaruh positif atau searah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (2) Pada Uji F (Uji simultan) diperoleh hasil bahwa Variabel Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (3) Pada Koefisien korelasi diketahui bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah SDM (X_1), Sistem Pengendalian Intern (X_2) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X_3) mempunyai hubungan tinggi dan kuat sekali dengan Kualitas Laporan Keuangan (Y) di SKPD Kota Pekanbaru dengan nilai koefisien $R = 92,6\%$ dan pada Koefisien determinasi (*adjusted R²*) bahwa variabel-variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan mampu dijelaskan oleh variasi variabel bebasnya yaitu variabel Sistem Kompetensi SDM (X_1), Sistem Pengendalian Intern (X_2) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X_3) sebesar 85,3% sedangkan sisanya sebesar 14,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Pekanbaru) (Sudarno)

(4) Pada regresi linear berganda yang paling dominan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan dari ketiga variabel bebas (Kompetensi SDM- X_1 , Sistem Pengendalian Intern- X_2 dan Sistem Informasi Keuangan Daerah- X_3) adalah Variabel Sistem Pengendalian Intern artinya Variabel Sistem Pengendalian Intern meningkat maka Kualitas Laporan Keuangan juga meningkat.

Menindaklanjuti kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sekaligus saran-saran sebagai berikut: (1) Pimpinan di setiap SKPD Kota Pekanbaru agar selalu bisa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelatihan dan pendidikan yang tepat dan berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi, secara konsisten melaksanakan sistem pengendalian intern dan memaksimalkan serta terus melakukan updating system dalam pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah secara efektif. SKPD Kota Pekanbaru juga perlu mengimplementasikan SAP secara tepat dan lengkap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga opini BPK untuk Kota Pekanbaru yang Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bisa menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditahun-tahun berikutnya. (2) Dalam hal objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti-peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut variabel yang lain yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah dari objek penelitian ini seperti Penerapan SAP, teknologi informasi, pengawasan keuangan, rekonsiliasi, peran PPK-SKPD dan lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, Dian Tri, 2014, *Faktor– Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Di Kabupaten Sidoarjo)*, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015*. www.bpk.go.id.
- Departemen Dalam Negeri, 2006, *Konsep Panduan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*
- Fuad, Noor dan Ahmad, Gofur. 2009. *Integreted Human Resources Development*. PT Grasindo, Jakarta.
- Halim, A. 2009. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba empat. Jakarta.
- Mahaputra, I Putu Upa bayu Rama ,2014, *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Bali
- Manopo, Christine. 2011. *Competency Based Talent and Performance Management System*. Salemba Empat. Jakarta
- Mulyadi, 2006, *Sistem Akuntansi*, BPFE, Yogyakarta
- Nurillah, As syfa ,2014, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Pradono, Febrian Cahyo dan Basukianto, 2015, *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi 65 Tengah)*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Universitas Stikubang, Semarang
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita, 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar Aplikasi Riset*. Salemba Empat, Jakarta
- Sekaran, Uma, 2006. *Research Methods For Business : Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 2. Salemba Empat : Jakarta
- Subana, M. Dan Sudrajat, 2006, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. CV Pustaka Pelajar, Bandung
- Sugiyono. 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung
- Sukmaningrum, Tantriani, dan Harto, 2012, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang)*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang
- Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah, 2009, *Manajemen Sumber Daya manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sutrisno, Edy. 2009. *Budaya Organisasi*. Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Thoha, M. 2008. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Umar. Husein, 2008. *Manajemen Riset dan Perilaku Konsumen*. PT. Gramedia Pusat, Jakarta
- Wibowo, 2011, *Manajemen Kinerja*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Yunirasih, Tjutju dan Suwatno. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Alfabeta, Bandung
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
- Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 pada Pasal 70: ayat 1, tentang *pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah* _____, No. 13 Tahun 2006 dalam pasal 23 ayat 1, *Sistem akuntansi pemerintahan daerah*

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
_____, Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
_____, Nomor 65 Tahun 2010 *Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta
_____, Nomor 8 Tahun 2006 *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta
Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
_____, No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara